

## ABSTRAKSI

Maria Rosa Misticha Reng, 18.75.6385. *Pemeriksaan terhadap perempuan sebagai Pelecehan Martabat Manusia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Skripsi. Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat Agama Katolik, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2022.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memahami konsep pemeriksaan dalam kaitannya dengan martabat manusia terutama dalam korelasinya dengan tindak pemeriksaan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Objek kajian utamanya adalah pemeriksaan dan martabat manusia. Korelasi antara pemeriksaan dan martabat manusia dikaji dengan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia. Berhadapan dengan masalah pemeriksaan ini, penulis menggunakan sumber-sumber yang dapat memperkuat validitas pokok pikiran penulis. Sumber-sumber tersebut berupa buku-buku referensi, artikel, jurnal, manuskrip dan internet yang secara khusus mengkaji tentang teks pemeriksaan, martabat manusia dan Hak Asasi Manusia. Langkah-langkah pengumpulan data dengan teks dan telaah kepustakaan dilakukan dengan beberapa langkah antara lain, pertama membaca dan memahami konsep pemeriksaan. Kedua, memahami hakekat martabat manusia. Ketiga, penulis coba melihat korelasi antara tindak pemeriksaan dan martabat manusia ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pemeriksaan terhadap perempuan merupakan suatu pelecehan martabat manusia. Oleh karena itu, terdapat empat usaha penegakan Hak Asasi Manusia dalam menangani kasus pemeriksaan. Pertama, HAM dan penerapan hukum positif. Artinya bahwa hukum yang dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan hukum yang sedang berjalan. Kedua, rehabilitasi korban. Artinya bahwa ada advokasi hukum terhadap korban pemeriksaan. Ketiga, intervensi terhadap kasus pemeriksaan. Artinya bahwa pihak hukum harus meningkatkan sanksi hukum terhadap pelaku dengan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan konteks kejahatan yang dilakukan terhadap korban. Keempat, pendidikan Hak Asasi Manusia. Artinya bahwa pihak penegak hukum mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan bentuk kejahatan tindak pemeriksaan sebagai suatu perbuatan yang melecehkan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia

Hasil penelitian juga membuktikan bahwa hukum pidana di Indonesia belum mencapai kemaksimalan. Artinya bahwa hukum pidana masih terbelenggu dalam perangkap ideologi patriarki. Perlu ada upaya untuk membangun penegakan keadilan Hak Asasi Manusia.

**Kata kunci: Pemeriksaan terhadap Perempuan, Martabat Manusia, dan Hak Asasi Manusia**

## ABSTRACT

Maria Rosa Misticha Reng, 18.75.6385. *Rape of Women as a Harassment towards Human Dignity in the Perspective of Human Rights*. Thesis. Catholic Theology - Philosophy Study Program, Ledalero Catholic School of Philosophy, 2022.

The aim of this thesis writing is to understand the concept of rape in relation to human dignity, especially in its correlation with the act of rape as a human rights violation.

The method used in this research is library research. The main object of study is rape and human dignity. The correlation between rape and human dignity is studied using a human rights perspective. To understand the rape problem, the writer uses sources that can strengthen the validity of the main idea. These sources include books of reference, articles, journals, manuscripts, and the internet that specifically examine the texts on rape, human dignity, and human rights. The steps for collecting data using text and literature review were carried out in several steps. First, reading and understanding the concept of rape. Second, understanding the nature of human dignity. Third, seeing the correlation between rape and human dignity from the perspective of human rights.

Based on the results of the study, it can be concluded that the rape of women is a violation of human dignity. Therefore, there are four efforts to enforce human rights in dealing with rape cases. First, human rights and the application of positive law. This means that the law imposed on the perpetrator is in accordance with the current law. Second, rehabilitation of the victims. This means that there is legal advocacy against rape victims. Third, intervention in rape cases. This means that the law must increase legal sanctions against the perpetrators by giving appropriate sanctions to the perpetrators in accordance with the context of the crimes committed against the victims. Fourth, human rights education. This means that law enforcement agencies have an obligation to socialize the form of the crime of rape as an act that violates human dignity and violates human rights.

The results of the study also prove that criminal law in Indonesia has not yet reached its maximum potential. This means that criminal law is still shackled in the trap of patriarchal ideology. There needs to be an effort to build justice for human rights.

**Keywords: Rape of Women, Human Dignity, Human Rights**